

ABSTRAK

Desa memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan pembangunan. Desa wisata, yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal, menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan Mata Air Sumber Agung sebagai kawasan lindung dan wisata di Pekon Margoyoso, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), metode peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dengan teori Edwards III (1980), yang mendasarkan 4 (empat) faktor dikatakan berhasil, menunjukkan: **Komunikasi:** 1) Transmisi, yang kurang jelas teridentifikasi pada tahap implementasi Perde menjadi SOP, 2) Kejelasan, komunikasi terjadi dialog langsung dan pesan dalam hal operasional, informasi berhasil disampaikan dengan jelas dan cepat, 3) Konsistensi, berkelanjutannya objek wisata tidak hanya didukung oleh saluran komunikasi yang berkelanjutan, tetapi juga oleh komunikasi konten yang mendalam dan terperinci, dari berbagai pihak.

Selanjutnya peneliti menemukan: **Sumber Daya:** 1) Sumber Daya Manusia, implementasi pengelolaan objek wisata mata air Sumber Agung menghadapi kendala signifikan dalam hal pengembangan sumber daya manusia, 2) Sumber Daya Anggaran, kekurangan dalam finansial untuk pengembangan sarana dan prasarana tetap menjadi kendala utama, 3) Sumber Daya Peralatan, beberapa fasilitas dasar yang telah tersedia di objek wisata mata air Sumber Agung, masih ada banyak aspek infrastruktur yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, 4) Sumber Daya Kewenangan, pengelola yang tidak menerima SK resmi menghadapi ketidakpastian dan kurangnya legitimasi dalam menjalankan tugas mereka. **Disposisi:** 1) Pengangkatan Birokrasi, pembentukan pengelolaan objek wisata oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes, 2) Insentif, insentif bagi pengelola terutama berbentuk upah harian, tetapi masih tergolong rendah.

Terakhir adalah temuan **Struktur Birokrasi:** 1) Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP), tugas dan tanggungjawab yang diikuti oleh pengelola, berpatokan langsung dengan Peraturan Pekon Margoyoso, Nomor: 141/001/56.07/2020, hal ini menjadi kelemahan karena tidak adanya SOP yang dibuat, 2) Melaksanakan Fragmentasi, penyebaran tanggungjawab pada tingkatan pengelola, beberapa jabatan tidak menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Edwards III (1980), komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

ABSTRACT

Villages play an essential role in the national economy and development. Tourism villages, which utilize natural beauty and local culture, are one of the main strategies for improving the welfare of village communities. This research focuses on implementing policies for managing Sumber Agung Springs as a protected tourist area in Pekon Margoyoso, Tanggamus Regency, Lampung Province. Using Edwards III (1980) policy implementation theory, the research method is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques use observation, interviews, and collecting supporting documents. Data was analyzed by collecting, reducing, presenting, and drawing conclusions.

The results of research using Edwards III (1980) theory, which is based on 4 (four) factors that are said to be successful, show Communication: 1) Transmission, which needed to be identified at the Perde implementation stage into SOP. 2) Clarity, communication occurs in direct dialogue and messages in operational matters, and information was successfully conveyed clearly and quickly; 3) Consistency, the sustainability of tourist attractions is supported by continuous communication channels and in-depth and detailed content communication from various parties.

Furthermore, the researchers found Resources: 1) Human Resources, implementation of the management of the Sumber Agung spring tourist attraction faces significant obstacles in terms of human resource development; 2) Budget Resources, lack of finances for the development of facilities and infrastructure remains the main obstacle, 3) Equipment Resources, several basic facilities are available at the Sumber Agung spring tourist attraction, there are still many infrastructure aspects that need to be repaired and upgraded, 4) Authority Resources, managers who do not receive an official decree face uncertainty and lack of legitimacy in carrying out their task. Disposition: 1) Appointment of Bureaucracy, establishment of management of tourist attractions by the Village Government through BUMDes, 2) Incentives, incentives for managers are mainly in the form of daily wages, but are still relatively low.

Lastly are the findings of Bureaucratic Structure: 1) Creating Standard Operating Procedures (SOP), duties, and responsibilities followed by managers, based directly on Pekon Margoyoso Regulations, Number: 141/001/56.07/2020; this is a weakness because there is no SOP in place created, 2) Carrying out fragmentation, spreading responsibilities at the management level, some positions do not carry out their functions.

Keywords: Policy Implementation, Edwards III (1980), communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.